

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian *Franchise*

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian itu sendiri adalah “Suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.¹⁰ Selanjutnya dapat dipastikan ketentuan yang menjadi dasar dalam KUHPdata tentang perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUH Pdt, 1320 KUH Pdt, 1338 KUH Pdt.

Ketentuan perjanjian pada Pasal 1313 KUH Pdt merupakan definisi dari perjanjian itu sendiri yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan Pasal 1320 KUH Pdt, merupakan dasar yang menjadi syarat sahnya perjanjian seperti, adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 KUH Pdt yang juga merupakan ketentuan dasar perjanjian menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

¹⁰ M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni. Hal.3.

perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini yang menjadikan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain dalam perjanjian tidak bisa timbul dengan sendirinya.

Hubungan itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”. Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh “prestasi”. Sedangkan pihak lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi.¹¹

Jika dalam suatu perjanjian terjadi sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.¹²

b. Asas - Asas Perjanjian

Yang dimaksud dengan asas-asas hukum perjanjian adalah prinsip yang harus di pegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke

¹¹ *Ibid.* Hal.6-7.

¹² Suharnoko. 2004. *Sejarah dan Pengertian Franchise*. Jakarta Timur. Prenada Media. Hal.15.

dalam hubungan hukum perjanjian. Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum utama dalam melakukan suatu perjanjian, dikenal 5 asas penting sebagai berikut :

1. Asas Sepakat (Konsensualitas)

Asas konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian Riil, Misalnya:

- a. Perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Pdt)
- b. Perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Pdt)
- c. Perjanjian pinjam pakai sampai habis (Pasal 1754 KUH Pdt)

Asas konsensualitas ini dapat kita simpulkan dari Pasal 1320 KUH Pdt yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam Pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah atau mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹³

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang yang dikenal

¹³ Komariah. 2013. *Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang. UMM Press. Hal.143.

sebagai perjanjian bernama, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Pdt yang menentukan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan kata “semua”, Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang. Jadi dalam hal perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat Undang-Undang bagi para pihak itu sendiri.

Pasal-Pasal yang ditentukan berlaku sepanjang para pihak tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang diadakan. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Selain itu, meskipun setiap orang bebas membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* Hal.144.

3. Asas Kepastian Hukum

Pasal 1338 KUH Pdt menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini tertuang asas kepastian hukum, karena mengakui isi perjanjian sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang disebut dengan Undang-Undang dalam arti konkrit, yakni Undang-Undang yang lahir dari perjanjian dan hanya berlaku kepada para pihak dalam perjanjian.¹⁵

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Pdt, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.¹⁶

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1320 KUH Pdt. Didalam Pasal 1315 KUH Pdt

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Merry T. J. Ruauw. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise*. Manado. Jurnal Hukum Vol.1/No.1. Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal.116.

berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.¹⁷

c. Syarat Sahnya Perjanjian

1. Sepakat Mereka Mengikatkan Diri

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.¹⁸

2. Kecakapan Hukum Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1330 KUH Pdt disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Pdt belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi).¹⁹

3. Terkait Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Komariah. *Op.cit.* Hal.146.

¹⁹ *Ibid.*

jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

Syarat-syarat untuk menjadi obyek perjanjian adalah :

- a. Barang-barang yang diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Pdt).
- b. Barang-barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Pdt). Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung jumlahnya.
- c. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat 1 KUH Pdt) kecuali warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat 2 KUH Pdt).²⁰

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab atau *causa* ini yang dimaksudkan Undang-Undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab yang halal merupakan gambaran tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Pdt.²¹

2. Tinjauan Umum tentang *Franchise*

a. Pengertian *Franchise*

Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *Franchisee* untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa dibawah nama

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* Hal.147.

dan identitas *Franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *Franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (*Assistance*) terhadap *Franchisee*. Sebagai imbalannya *Franchisee* membayar sejumlah uang berupa *Initial Fee* dan *Royalty Fee*.²²

Dalam pengertian yang demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang *Franchisee* juga menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara yang ditetapkan oleh *Franchisor*. Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara yang ditetapkan *Franchisor* membawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha *Franchise* adalah usaha yang mandiri, yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik *Franchisee*). Ini berarti pemberian *Franchise* menuntut eksklusivitas, dan bahkan banyak hal yang mewajibkan terjadinya noncompetition clause bagi *Franchisee*, bahkan setelah perjanjian pemberian *Franchise* berakhir.²³

b. Bentuk - Bentuk *Franchise*

1. *Product and Trade Mark Franchise*

Dalam bentuk *Product and Trade Mark Franchise*, *Franchisor* memberikan lisensi kepada *Franchisee* untuk menjual produk-produk atau merek dagang dari *Franchisor*.²⁴ Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya

²² Suharnoko. *Op.cit.* Hal.83.

²³ Gunawan Widjaja. *Op.cit.* Hal.16.

²⁴ Suharnoko. *Loc.cit.*

Franchisor mendapatkan sesuatu bentuk pembayaran *royalty* dimuka, dan selanjutnya *Franchisor* memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan oleh *Franchisee*. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, *Franchise* dari produk dan merek dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor, lisensi penjualan.²⁵

2. *Business Format Franchise*

Dalam bentuk *Business Format Franchise*, *Franchisor* memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman, standar pengoperasian usaha dan juga bantuan dalam mengoperasikan *Franchise*. Dengan demikian *Franchisee* mempunyai identitas yang tidak terpisahkan dari *Franchisor*. Pada umumnya bentuk ini digunakan dalam usaha *fast food restaurant* seperti KFC, Pizza Hut, Mc Donald.²⁶

c. Peraturan *Franchise* di Indonesia

Untuk mengatur *Franchise* di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba, sebagai peraturan pelaksanaannya.

²⁵ Sheila Felicia. 2010. *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro. Hal.94.

²⁶ Suharnoko. *Loc.cit*.

Pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup Waralaba terdapat pada Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, menyatakan bahwa Pasal 2 ayat 1, Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki ciri khas usaha.
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan.
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan.
6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

Masih dalam ruang lingkup Waralaba, pada Pasal 2 ayat 2 juga menyatakan bahwa “Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan / atau nama Waralaba untuk nama dan / atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Selain syarat tentang kriteria dan ruang lingkup, para pihak harus mendaftarkan surat perjanjian Waralaba / *Franchise* atau surat tanda pendaftaran Waralaba yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007.

Sebagaimana surat perjanjian Waralaba / *Franchise* harus didaftarkan, Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 mengeluarkan peraturan yang terdapat pada Pasal 9 dan Pasal 10 sebagai berikut :

1. Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
2. Penerima Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
3. STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. STPW sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
5. STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Jangka waktu STPW berakhir.
 - b. Perjanjian Waralaba berakhir.
 - c. Pemberi Waralaba dan / atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Sedangkan didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang juga mengatur tentang aturan teknis tentang Waralaba. Khususnya terkait pendaftaran surat perjanjian

Waralaba ke Menteri Perdagangan, yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 bahwa :

1. Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.
2. Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
3. Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba.
4. Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap bisnis *Franchise* yang akan diselenggarakan maka bisnis *Franchise* tersebut harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak *Franchisor* dengan pihak *Franchisee*. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak *Franchisor* dan pihak *Franchisee* harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, dalam hal ini perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁷

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian *Franchise* yang diwajibkan untuk dibuat secara tertulis wajib memuat klausula paling sedikit sebagai berikut :

²⁷ Juajir Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Makasar. Arus Timur. Hal.129.

1. Nama dan alamat para pihak.
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual.
3. Kegiatan usaha.
4. Hak dan kewajiban para pihak.
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.
6. Wilayah usaha.
7. Jangka waktu perjanjian.
8. Tata cara pembayaran imbalan.
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.
10. Penyelesaian sengketa.
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Tentu hal ini mewajibkan *Franchisor* untuk mendaftarkan prospektus penawaran bisnis *Franchise* sebelum membuat perjanjian *Franchise* dengan *Franchisee*. Pendaftaran prospektus penawaran bisnis *Franchise* dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa. Demikian pula sebaliknya, pihak *Franchisee* wajib mendaftarkan Perjanjian *Franchise* yang telah dibuatnya dengan pihak *Franchisor*, dimana pendaftaran perjanjian *Franchise* ini juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.²⁸

²⁸ *Ibid.* Hal.132.

Untuk permohonan baru STPW *Franchisor* yang berasal dari dalam negeri, maka dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Izin Teknis.
2. Fotokopi Prospektus Penawaran *Franchise*.
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang.
5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI.
6. Fotokopi KTP Pemilik / Penanggungjawab Perusahaan.

Permohonan baru STPW *Franchisee* yang berasal dari *Franchisee* dalam negeri, maka dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Izin Teknis.
2. Fotokopi Prospektus Penawaran *Franchise* dari *Franchisor*.
3. Fotokopi Perjanjian *Franchise*.
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Fotokopi STPW *Franchisor*.
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang.
7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI.
8. Fotokopi KTP Pemilik / Penanggungjawab Perusahaan.

Untuk permohonan perpanjangan STPW, maka dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.

3. Bentuk Hubungan Hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee* dalam Perjanjian *Franchise*

Sebagaimana kita ketahui hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee* ditandai dengan ketidakseimbangan tawar menawar (*Unequal Bargaining Power*). Perjanjian *Franchise* merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh *Franchisor*. *Franchisor* menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh *Franchisee* yang memungkinkan *Franchisor* dapat membatalkan perjanjian apabila dia menilai *Franchisee* tidak dapat memenuhi kewajibannya.²⁹

Franchisor juga mempunyai discretionary power untuk menilai semua aspek usaha *Franchisee*, sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi *Franchisee* dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan *Franchisor* untuk memperbaharui perjanjian.³⁰

Dalam hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee*, *Franchisor* dapat memanfaatkan kedudukan *Franchisee* untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka

²⁹ Suharnoko. *Op.cit.* Hal.85.

³⁰ *Ibid.*

Franchisor memutuskan perjanjian dengan *Franchisee*, selanjutnya *Franchisor* mengoperasikan outlet atau tempat tempat usaha sendiri di wilayah *Franchisee*. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan *Franchise* Indonesia dibandingkan dengan pertumbuhan *Franchise* asing yang berada di Indonesia.³¹

Serta yang perlu kita ketahui bahwa bentuk perjanjian *Franchise* antara *Franchisor* dan *Franchisee* adalah salah satu pola hubungan hukum atau disebut pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar untuk menjalankan metode bisnis yang sudah dirancang oleh *Franchisor*.

Karakteristik pokok hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee* dalam perjanjian *Franchise* sebagai berikut :

1. Ada kesepakatan kerjasama yang tertulis.
2. Selain kerjasama tersebut *Franchisor* mengizinkan *Franchisee* menggunakan merek dagang dan identitas usaha milik *Franchisor* dalam bidang usaha *Franchise* yang telah disepakati. Penggunaan identitas usaha tersebut akan menimbulkan asosiasi pada masyarakat dengan adanya kesamaan produk dan jasa dengan *Franchisor*.
3. Selama kerjasama pihak *Franchisor* memberikan jasa penyiapan usaha dan melakukan pendampingan berkelanjutan kepada *Franchisee*.
4. Selama kerjasama tersebut *Franchisee* mengikuti ketentuan yang telah disusun oleh *Franchisor* untuk menjadi dasar usaha yang sukses.

³¹ *Ibid.*

5. Selama kerjasama tersebut *Franchisor* melakukan pengendalian hasil dan kegiatan serta kedudukan sebagai pimpinan kerjasama.³²

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian *Franchise*

Perjanjian *Franchise* merupakan suatu perjanjian yang pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan yang bersifat timbal balik. Didalam perjanjian *Franchise* yang bersifat timbal balik, maka tentunya membebani suatu kewajiban bagi masing-masing pihak dan dapat dikatakan bahwa kewajiban dari salah satu pihak merupakan suatu hak bagi pihak lain begitu juga sebaliknya. Maka dari itu penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian *Franchise* akan dijelaskan lebih detail dan terperinci.

a. Hak Bagi *Franchisor* dalam Perjanjian *Franchise*

Adapun hak bagi *Franchisor* yang merupakan kewajiban dari seorang *Franchisee* dalam perjanjian *Franchise* yaitu :

1. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan *Franchise*.
2. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha *Franchisee*.
3. Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja *Franchisee* guna memastikan bahwa *Franchise* yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

³² Indira Hastuti. 2006. *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise)*. Semarang. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Hal.32.

4. Sampai batas tertentu mewajibkan *Franchisee* dalam hal-hal tertentu, untuk memberi barang modal dan atau barang-barang tertentu lainnya dari *Franchisor*.
5. Mewajibkan *Franchisee* untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.
6. Mewajibkan agar *Franchisee* tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.
7. Menerima pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya.
8. Meminta dilakukannya pendaftaran atas *Franchise* yang diberikan kepada *Franchisee*.
9. Atas berakhirnya *Franchise*, meminta kepada *Franchisee* untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh *Franchisee* selama masa pelaksanaan *Franchise*.

10. Atas pengakhiran *Franchise*, melarang *Franchisee* untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh *Franchisee* selama masa pelaksanaan *Franchise*.
11. Atas pengakhiran *Franchise*, melarang *Franchisee* untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.
12. Pemberian *Franchise*, kecuali yang bersifat eksklusif, tidak menghapuskan hak *Franchisor* untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.³³

b. Kewajiban Bagi *Franchisor* dalam Perjanjian *Franchise*

Adapun kewajiban bagi *Franchisor* yang merupakan hak seorang *Franchisee* dalam perjanjian *Franchise* yaitu :

1. Memberikan segala macam informasi berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya

³³ Gunawan Widjaja. *Op.cit.* Hal.82.

sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*, dalam rangka pelaksanaan *Franchise* yang diberikan tersebut.

2. Memberikan bantuan kepada *Franchisee* pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam pelaksanaan *Franchise*.³⁴

c. Hak Bagi *Franchisee* dalam Perjanjian *Franchise*

Adapun hak bagi *Franchisee* yang merupakan kewajiban dari seorang *Franchisor* dalam perjanjian *Franchise* yaitu :

1. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan *Franchise* yang diberikan tersebut.
2. Memperoleh bantuan dari *Franchisor* atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* Hal.86.

d. Kewajiban Bagi *Franchisee* dalam Perjanjian *Franchise*

Adapun kewajiban bagi *Franchisee* yang merupakan hak seorang *Franchisor* dalam perjanjian *Franchise* yaitu :

1. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh *Franchisor* kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.
2. Memberikan keleluasaan bagi *Franchisor* untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala atau secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa *Franchisee* telah melaksanakan *Franchise* yang diberikan dengan baik.
3. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari *Franchisor*.
4. Sampai batas tertentu membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan *Franchise* dari *Franchisor*.
5. Menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian *Franchise*.

6. Melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise* yang ditemukan dalam praktik.
7. Tidak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise* selain dengan tujuan untuk melaksanakan *Franchise* yang diberikan.
8. Melakukan pendaftaran *Franchise*.
9. Tidak melakukan kegiatan sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.
10. Melakukan pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama.
11. Atas pengakhiran *Franchise*, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya.

12. Atas pengakhiran *Franchise*, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh *Franchisee* selama masa pelaksanaan *Franchise*.
13. Atas pengakhiran *Franchise*, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek *Franchise*.³⁶

B. Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian *Franchise*

1. Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee*

a. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Jangka Waktu

Berkaitan dengan jangka waktu, perjanjian *Franchise* ditentukan berlaku sekurang-kurangnya adalah 5 tahun.³⁷ Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba / *Franchise* dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba.

Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian *Franchise*, namun pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan

³⁶ *Ibid.* Hal.84-85.

³⁷ *Ibid.* Hal.96.

jangka waktu perjanjian Waralaba sekurangnya 5 tahun dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.³⁸

Pada Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba menyatakan bahwa *Franchisor* wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sedangkan *Franchisee* wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian Waralaba. STPW tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jika diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Jangka waktu yang umumnya diterapkan dalam perjanjian *Franchise* tidak begitu lama, hanya berkisar antara 2 sampai dengan 5 tahun meskipun dimungkinkan untuk perpanjangan, namun dengan jangka waktu yang relatif pendek tersebut seandainya terjadi pengakhiran perjanjian maka *Franchisee* akan rugi karena investasi *Franchise*, *Franchise Fee* dan *Royalty* sangat besar dikeluarkan, belum lagi masalah jika kompensasi keuntungan dari bisnis *Franchise* yang dijalankan tidak sebesar apa yang dijanjikan *Franchisor* dengan perkiraan keuntungan selama jangka waktu menjalin kerja sama.³⁹

Kembali disebutkan bahwa pada Pasal 17 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada

³⁸ Sheila Felicia. *Op.cit.* Hal.67.

³⁹ Bambang Tjatur Iswanto. *Op.cit.* Hal.84.

Franchisee sebagai Penerima Waralaba, karena dengan demikian *Franchisor* tidak dapat memutuskan perjanjian *at any time* atau dengan perkataan lain dilarang dibuat suatu perjanjian *Franchise* yang bersifat *at will*, kapan saja dapat diputuskan.⁴⁰

Hal ini dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencegah *Franchisor* memanfaatkan *Franchisee* hanya sekedar untuk menguji pasar. Namun juga perlu dicermati klausula-klausula tentang pemutusan perjanjian yang biasanya tunduk pada penilaian *Franchisor*.⁴¹

Jadi campur tangan Negara dalam hal pengaturan jangka waktu dalam perjanjian *Franchise* bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada *Franchisee*, tidak terlepas bahwa *Franchise* akan benar-benar dapat memberikan kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk mengembangkan bisnis dan memberi kesempatan agar hak dan kewajiban terhadap perjanjian *Franchise* benar-benar dapat disalurkan.⁴²

b. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan *Royalty*

Berkaitan dengan *royalty*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, hanya mengenal pembayaran kompensasi dalam bentuk *Direct Monetary Compensation*. Ini berarti jenis pembayaran yang dapat dilakukan dapat terwujud dalam bentuk :

⁴⁰ Suharnoko. *Op.cit.* Hal.99.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Bambang Tjatur Iswanto. *Op.cit.* Hal.85.

1. *Lum-sum payment*, yang dapat dilakukan sekaligus maupun dalam beberapa kali pembayaran cicilan.
2. *Royalty*, yang besar atau jumlah pembayarannya dikaitkan dengan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi, dan / atau penjualan dari barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan pemberian *Franchise*, yang pembayarannya dilakukan secara catur wulan, semesteran atau tahunan.⁴³

Sesuai ketentuan tersebut, bahwa diberikannya izin dalam menggunakan metode dan merek dagang dari *Franchisor* pihak *Franchisee* diwajibkan untuk membayar *royalty* kepada pihak *Franchisor* atau Pemberi Waralaba. Besarnya *royalty* yang harus dibayarkan oleh pihak *Franchisee* umumnya ditentukan sendiri oleh pihak *Franchisor* dalam perjanjian *Franchise*.⁴⁴

Maka dari itu perjanjian *Franchise* diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang memuat klausula tentang tata cara pembayaran imbalan atau jumlah *royalty* yang harus dibayarkan oleh *Franchisee* dan harus didaftarkan sebagai prospektus penawaran Waralaba atas kesepakatan *Franchisor* dan *Franchisee* dalam pembayaran *royalty*.

⁴³ Gunawan Widjaja. *Op.cit.* Hal.99-100.

⁴⁴ A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati. 2015. *Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*. Surabaya. Jurnal Hukum Bisnis Vol.1/No.1. Lutfansah Mediatama Surabaya. Hal.8.

c. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Bisnis *Franchise*

Pada dasarnya setiap perikatan, termasuk perjanjian memiliki jangka waktu berlakunya, dan akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian *Franchise* yang diatur dalam perjanjian *Franchise*, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui oleh para pihak (*Time Constraint*). Hal lain yang juga perlu untuk mendapat perhatian adalah masalah pengakhiran lebih awal. Dalam hal ini perlu diatur secara pasti dan jelas apa-apa saja yang merupakan dan menjadi dasar pembenaran pengakhiran lebih awal.⁴⁵

Di Indonesia perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Pdt, yang hingga saat ini masih belum jelas statusnya. Apakah ketentuan Pasal 1266 KUH Pdt tersebut dapat disimpangi atau tidak oleh para pihak. Pasal 1266 KUH Pdt menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai pembatalan atau pengakhiran tersebut telah di jatuhkan oleh hakim.⁴⁶

Sedangkan isi dari Pasal 1266 KUH Pdt sendiri menyatakan, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga

⁴⁵ Gunawan Widjaja. *Op.cit.* Hal.98-99.

⁴⁶ *Ibid.* Hal.99.

harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”.

Kompensasi ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian *Franchise*, secara umum juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Pdt. Menurut ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak terhadap siapa suatu perikatan tidak dipenuhi dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dalam hal ini, maka tuntutan ganti rugi yang diminta sebagai akibat pembatalan, pemutusan atau pengakhiran perjanjian *Franchise* secara lebih awal harus jelas dan dapat dikuantifikasikan dalam suatu nilai nominal mata uang tertentu.⁴⁷

Pasal 1267 KUH Pdt sendiri menyatakan bahwa “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Selama ini dalam perjanjian *Franchise* lebih memberikan kewenangan hak untuk pemutusan hubungan oleh *Franchisor* dengan alasan-alasan tertentu. Kewenangan tersebut yang tertuang dalam

⁴⁷ *Ibid.*

materi perjanjian *Franchise* dapat dikatakan sebagai suatu dominasi *Franchisor* dalam hubungan *Franchising*. Kewenangan semacam ini harus dibatasi karena dari berbagai kasus sebagaimana disinggung sebelumnya memperhatikan bahwa dengan alasan-alasan bisnis yang lebih menguntungkan maka *Franchisor* akan beralih untuk melakukan pemutusan hubungan.⁴⁸

Bagi *Franchisee* pun hendaknya diberikan kewenangan dalam *termination clause* dengan kompensasi tertentu, misalnya pengembalian *initial investment Franchisee* maupun aset yang dimiliki atas modal *Franchise*. Demikian pula halnya dengan persoalan klausula *governing law* pada perjanjian *Franchise*, yang menyangkut *choice of law* dan *choice of forum*. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan terhadap materi perjanjian *Franchise* terutama yang menyangkut *governing law clause* untuk menciptakan perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam hal terjadi sengketa.⁴⁹

2. Perlindungan Hukum Bagi *Franchisor*

Berkaitan dengan merek dagang, PH Collin dalam *Law Dictionary* mendefinisikan *Franchise* sebagai “*License to trade using a brand name and paying a royalty for it*”.⁵⁰ Definisi tersebut menekankan pada

⁴⁸ Bambang Tjatur Iswanto. *Op.cit.* Hal. 87.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ PH Collin. 1986. *English Law Dictionary*. London. Peter Collin Publishing. Dalam Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal.14.

pentingnya peran nama dagang atau merek dagang dalam pemberian Waralaba / *Franchise* dengan imbalan *royalty*.⁵¹

Rumusan diatas menunjukan bahwa Waralaba / *Franchise* ternyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian Waralaba / *Franchise* lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang dari Pemberi Waralaba / *Franchisor*.⁵² Berikut merupakan bentuk perlindungan hukum mengenai Waralaba / *Franchise* dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk.

a. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Merek

Pengaturan *Franchise* dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat kita temukan dalam aturan lisensi Pasal 42 Bagian Kedua BAB V jo Pasal 1 angka 18, dapat dipilah kedalam beberapa unsur, yang meliputi :

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang merek.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian.
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak).
4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan.
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* Hal.15.

⁵³ *Ibid.* Hal.30.

Keharusan adanya pemberian izin oleh pemegang merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika penerima lisensi merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar hak atas merek. Disamping itu pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁵⁴

Dimaksud dengan pelanggaran merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang diajukan dapat berupa :

1. Gugatan ganti rugi.
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.⁵⁵

Maka dari itu suatu merek yang terdaftar diberi perlindungan eksklusif oleh Negara, Undang-Undang yang mengatur tentang merek mensyaratkan bahwa jangka waktu pemberian lisensi atau Waralaba / *Franchise* ini tidak boleh lebih lama dari pemberian perlindungan atas merek yang terdaftar tersebut.⁵⁶

b. Perlindungan Hukum Berkaitan dengan Rahasia Dagang

Pada dasarnya rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* Hal.31.

⁵⁶ *Ibid.* Hal.33.

nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.⁵⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk :

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan Pasal ini pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian *Franchise* ataupun Lisensi.⁵⁸

Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.⁵⁹ Berikut merupakan aspek hukum terkait perlindungan rahasia dagang :

⁵⁷ Ahmad M.Ramli. 2001. *Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang*. Bandung. Mandar Maju. Hal.2.

⁵⁸ *Ibid.* Hal.5.

⁵⁹ *Ibid.*

1. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.⁶⁰

2. Pelanggaran Rahasia Dagang

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pada Pasal 13 menyatakan bahwa “Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan”.⁶¹

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan

⁶⁰ *Ibid.* Hal.9.

⁶¹ *Ibid.* Hal.11.

sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya untuk menjaga rahasia dagang yang dimaksud.⁶²

3. Penyelesaian Sengketa di Bidang Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa terdapat pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4”. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri.

C. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Zainuddin Ali yaitu masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya.⁶³

⁶² *Ibid.* Hal.12.

⁶³ Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.66.

Pengertian kesadaran hukum juga dikemukakan oleh Ewick dan Silbey (Achmad Ali 2009:510) yaitu mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁶⁴ Jadi dari pengertian diatas disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.

Selain itu konsep kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (Saifullah 2007:105)⁶⁵ terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum adalah artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum (Mariyah 2009:28).⁶⁶
2. Pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi

⁶⁴ Ewick dan Silbey. Dalam Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termaksud Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana. Hal.510.

⁶⁵ Soerjono Soekanto. Dalam Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi hukum*. Bandung. Reflika Aditama. Hal.105.

⁶⁶ Mariyah. 2009. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi Di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat)*. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hal.28.

isinya, pemahaman hukum berkaitan dengan apakah seseorang mengerti tentang isi hukum yang berlaku (Mariyah 2009:29).⁶⁷

3. Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum.
4. Pola perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum.⁶⁸

2. Keterkaitan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perilaku manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman (Soerjono Soekanto 1986:230)⁶⁹ yaitu :

1. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.* Hal.29.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ H.C. Kelman. Dalam Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 230.

⁷⁰ *Ibid.*

2. *Identification*

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.⁷¹

3. *Internalization*

Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.⁷²

Demikian halnya didalam sosiologi, kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum ini pada umumnya menjadi pusat perhatian terutama mengenai basis-basis ataupun dasar kepatuhan seseorang yang mana dalam hal ini R. Bierstedt (Soerjono Soekanto 1982:225)⁷³ membagi menjadi empat dasar yaitu :

1. *Indoktrination*

Sebab pertama mengapa masyarakat mematuhi kaidah-kaidah hukum adalah mereka didoktrin untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ R. Bierstedt. Dalam Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. CV Rajawali. Hal.225.

Semula manusia tidak sadar, melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.⁷⁴

2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya sulit sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang seolah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila setiap hari hal itu ditemui, maka lama kelamaan hal itu menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulang perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.⁷⁵

3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu batasan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Batasan-batasan tadi merupakan pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan manusia taat pada kaidah adalah karena kegunaan daripada kaidah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.* Hal.226.

4. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa manusia patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengidentifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.⁷⁷

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diartikan bahwa seseorang bersikap patuh pada kaidah-kaidah hukum karena adanya kesadaran hukum yang melekat pada seseorang sejak proses sosialisasi yang lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

⁷⁷ *Ibid.*